Ringkasan Eksekutif Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Selatan 2012

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gerbang Indonesia Timur

1. Perkembangan Umum dan Arah Perencanaan

Sulawesi Selatan semakin memainkan peran penting dan strategis bagi perkembangan Kawasan Timur Indonesia dan Indonesia. Provinsi ini terletak di tengah wilayah Indonesia dengan luas 45.764,53 kilometer persegi, jumlah penduduk 8,032,551 jiwa (2010), terdiri dari 21 kabupaten dan tiga kota. Posisi tersebut menempatkannya sebagai pintu gerbang bagi Kawasan Timur Indonesia melalui perhubungan laut (Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar), perhubungan darat (Kota Makassar sebagai titik awal jalur darat trans-Sulawesi kearah Sulawesi Utara), dan perhubungan udara (Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar). Provinsi ini juga berperan penting sebagai lumbung pangan nasional dan pusat perkembangan kakao di Indonesia.

Sulawesi Selatan mengalami perkembangan sosial ekonomi yang pesat dalam lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut telah terjadi peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pergeseran struktur PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, perbaikan penanaman modal, penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran, dalam kondisi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Perkembangan ini berlangsung dalam kondisi membaiknya pelayanan publik, meningkatnya belanja pemerintah daerah, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur.

Kualitas manusia merupakan tantangan utama pembangunan daerah Sulawesi Selatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia, telah meningkat secara signifikan dan telah bergeser dari urutan 23 ke urutan 19 secara nasional. Capaian ini tetap membutuhkan perbaikan terus menerus, seperti halnya indikator sosial ekonomi yang lain guna mencapai kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Perekonomian Sulawesi Selatan didorong oleh sektor pertanian melalui komoditas unggulannya. Dalam lima tahun terakhir, sektor pertanian menyumbang 27 persen PDRB provinsi dan menyerap hampir separuh tenaga kerja (2009). Ini menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan masih ditopang oleh produk primer dan sumber daya manusia di pertanian tradisional. Tantangan dalam mengelola komoditas unggulan seperti kakao, komoditas pangan (padi dan jagung), serta komoditas kelautan (perikanan dan rumput laut) harus dihadapi dengan berorientasi pada agro industri dan agribisnis.

Konsistensi dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan arah yang semakin membaik. Secara umum, alokasi anggaran pemerintah daerah sejalan dengan perencanaannya. Meski demikian, beberapa aspek perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek penganggaran dibandingkan perencanaan dan konsistensinya. Beberapa inkonsistensi ditemukan pada tingkat yang berbeda, keterlambatan penyusunan RPJPD, dan masih adanya penetapan indikator dan target kinerja yang belum cermat.

2. Pendapatan dan Belanja Daerah

Antara tahun 2005 hingga 2010, pendapatan meningkat dua kali lipat, tetapi masih sangat bergantung pada transfer dari pusat. Selama periode tersebut, pendapatan tumbuh sebesar 76 persen mencapai hampir Rp. 16 triliun. Pendapatan pemerintah kabupaten/kota dengan tumbuh 11 persen per tahun, sementara pendapatan pemerintah provinsi tumbuh 9 persen per tahun. Transfer pusat menyumbang 76 persen pendapatan di Sulawesi Selatan, hingga mencapai Rp. 11 triliun pada tahun 2010. Hanya 7 persen dari pendapatan pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara 58 persen pendapatan pemerintah provinsi berasal dari PAD.

Daya serap anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tergolong rendah. Rendahnya daya serap ditandai oleh besarnya Sisa Lebih Perhitungan Angggaran (SiLPA) tahun anggaran, dimana SiLPA tahun sebelumnya mendominasi sumber penerimaan pembiayaan tahun berjalan, baik pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pada pemerintah kabupaten/kota, proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap penerimaan pembiayaan tahun berjalan mencapai 87 persen (2007), meskipun cenderung menurun menjadi 50 persen pada tahun 2010. Sedangkan pada pemerintah provinsi, seluruh penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA (2010).

Sulawesi Selatan perlu meningkatkan kualitas komposisi anggarannya. Hampir separuh belanja pemerintah di Sulawesi Selatan (44 persen) digunakan untuk belanja pegawai, sementara belanja modal menghabiskan 26 persen dari total anggaran. Belanja terbesar pemerintah provinsi adalah transfer ke daerah bawahan (37 persen), belanja ini sebagian besar digunakan untuk Program Kesehatan Gratis dan Pendidikan Gratis. Belanja pendidikan mendominasi belanja pemerintah kabupaten kota, sebesar 33 persen dari total belanja. Alokasi belanja untuk program-program terkait kesetaraan gender di Sulawesi Selatan juga masih rendah.

3. Kinerja Sektor Strategis

Sektor Pendidikan

Peningkatan belanja pendidikan diikuti pula dengan peningkatan capaian. Belanja pendidikan tumbuh sebesar 27 persen per tahun, di mana tiga perempatnya digunakan untuk belanja pegawai. Rasio guru- murid dan rasio sekolah-murid telah membaik di semua jenjang pendidikan. Angka melek huruf meningkat dari 85 (2005) menjadi 88 (2010), meskipun masih jauh tertinggal dari angka nasional, 93 (2010). Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di perkotaan lebih baik dibanding di kabupaten di mana Makassar, Palopo, dan Pare-pare memiliki angka yang tertinggi. Siswa perempuan cenderung memiliki lama sekolah yang lebih sedikit ketimbang siswa laki-laki, meskipun angka partisipasi sekolah perempuan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bawa Sulawesi Selatan menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan di pedesaan dan kepada siswa perempuan.

Kebijakan pendidikan gratis telah meningkatkan sinergi provinsi dengan kabupaten/kota dalam pembiayaan pendidikan. Kebijakan pendidikan gratis telah meningkatkan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam bersinergi membiayai pelayanan pendidikan. Kebijakan pendidikan gratis, sesuai dengan tujuannya, telah meringankan beban anak usia sekolah yang telah mengakses pendidikan, meskipun belum efektif menarik yang belum terjangkau untuk masuk ke bangku sekolah. Kebijakan ini telah memenuhi amanah untuk memenuhi hak dasar rakyat atas akses pendidikan, khususnya penduduk usia sekolah yang telah mengakses bangku sekolah, tetapi belum mendorong secara efektif anak usia sekolah yang terhalang ke sekolah karena membantu mencari nafkah keluarga atau karena faktor geografis.

Sektor Kesehatan

Indikator dasar kesehatan membaik seiring dengan peningkatan belanja kesehatan. Belanja kesehatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2010 mencapai Rp. 1,7 triliun, di mana 48 persennya digunakan untuk belanja pegawai. Proporsinya terhadap total belanja tidak berubah (9 persen). Beberapa perbaikan telah dicapai. Rasio fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan per 10.000 penduduk meningkat dari 2,2 (2005) menjadi 2,7 (2009) dan dari 15 (2005) menjadi 16,5 (2009). Angka harapan hidup meningkat dari 70,2 (2007) menjadi 70,8 (2010), mendekati angka nasional sebesar 70,9. Angka kematian bayi berhasil diturunkan dari 30 (2005) menjadi 26,6 (2009) per 1.000 kelahiran. Angka kematian ibu turun dari 133 (2006) menjadi 118 (2009) per 100.000 kelahiran.

Kebijakan kesehatan gratis, telah berhasil membantu meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Kebijakan kesehatan gratis juga berkontribusi terhadap perluasan cakupan layanan kesehatan, perbaikan kualitas layanan kesehatan, dan perluasan pola jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Namun kebijakan kesehatan gratis tampak lebih menekankan pada pemberian layanan dan pengobatan penyakit (bersifat jangka pendek) dan belum menyentuh investasi kesehatan secara jangka panjang seperti imunisasi, gizi, kesehatan lingkungan dan air bersih.

Sektor Infrastruktur

Peningkatan belanja infrastruktur juga meningkatkan peran Makassar dalam konektivitas, khususnya di kawasan timur Indonesia. Belanja infrastruktur Sulawesi Selatan tumbuh secara substansial menjelang pembangunan bandar udara baru. Di tahun 2010, belanja infrastruktur mencapai Rp. 2,5 triliun, atau 15 persen dari total belanja. Lebih dari 85 persennya dibelanjakan pada tingkat kabupaten/kota. Sulawesi Selatan memiliki aksesibilitas yang terbaik di kawasan timur Indonesia. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar melayani hampir semua jalur penerbangan udara yang menuju kawasan timur Indonesia. Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta di Kota Makassar adalah pelabuhan peti kemas yang terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

Infrastruktur dasar dan jalan masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah Sulawesi Selatan. Akses penduduk terhadap infrastruktur dasar yakni air bersih, sanitasi yang layak dan listrik meskipun menunjukkan posisi relatif yang cukup baik di Pulau Sulawesi, namun capaiannya masih berada di bawah angka rata-rata Nasional. Untuk infrastruktur jalan, lebih dari sepertiga dalam kondisi rusak ringan dan berat. Untuk jaringan irigasi, perbandingan antara cakupan saluran irigasi dengan luas lahan sawah cenderung menurun meskipun secara absolut lahan sawah yang dialiri cenderung meningkat.

Sektor Pertanian

Belanja pertanian meningkat dua kali lipat, walaupun kontribusinya terhadap perekonomian menurun. Belanja pertanian tumbuh sebesar 24 persen per tahun, mencapai Rp. 491 miliar pada tahun 2010. Separuh dari belanja pertanian dialokasikan untuk belanja pegawai. Sulawesi Selatan tetap menjadi lumbung pangan nasional, dengan komoditas utama seperti beras, jagung, ternak, rumput laut, dan kakao. Komoditas tersebut diproyeksikan mampu memenuhi target produksi masing-masing pada tahun 2013. Terlepas dari hal itu, kontribusi pertanian terhadap PDRB turun dari 31 persen (2005) menjadi 28 persen (2009), meski demikian pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB di Sulawesi Selatan.

4. Gender dan Isu Strategis Lainnya

Performa Sulawesi Selatan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan indikator gender cukup baik. Angka kemiskinan turun dari 15 persen di tahun 2006 menjadi 12 persen di tahun 2010, sebanyak 87 persen masyarakat miskin tinggal di pedesaan. Indeks pembangunan gender (IPG) meningkat dari tahun ke tahun, dari 50 di tahun 2005 menjadi 54 di tahun 2009. Indeks pemberdayaan gender (IDG) meningkat dari 57,4 (2005) menjadi 61,2 (2009). Perbaikan ini perlu dipertahankan, terlebih dikarenakan keberlanjutan program-program terkait gender masih kurang, dan belum konsisten dalam penganggarannya.

5. Rekomendasi Pembangunan

Meningkatkan kualitas anggaran lewat perencanaan dan komposisi anggaran yang lebih baik

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian serius pada penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran melalui peningkatan kompetensi aparat tenaga perencana dan pengelola keuangan daerah serta menciptakan kesepahaman persepsi di kalangan para stakeholder pembangunan daerah mengenai proses dan mekanisme perencanaan dan penganggaran. Secara spesifik, pemerintah daerah perlu lebih fokus memberi perhatian pada penyediaan dokumen dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran tahunan, baik pada level daerah dan terutama pada tingkat SKPD.

Meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah yang bersumber dari PAD. Meskipun penerimaan daerah yang bersumber dari PAD memperlihatkan nilai riil yang meningkat, namun kontribusinya terhadap total penerimaan daerah masih lebih kecil dibandingkan dengan transfer fiskal dari pemerintah pusat. Untuk itu, upaya peningkatan PAD masih perlu terus dilakukan melalui: (i) pengkajian dan perluasan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meskipun nilainya kecil dengan tetap memperhatikan undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbaru; (ii) perbaikan sistim administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menekan kebocoran; dan (iii) pelatihan aparat pemerintah daerah di bidang perpajakan terutama terkait dengan penetapan target yang berbasis pada potensi.

Memperbaiki komposisi dan kualitas alokasi belanja pemerintah untuk sektor-sektor strategis dan gender. Porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah mendominasi jenis belanja lainnya, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Proporsi alokasi belanja untuk sektor strategis (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian) masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor pemerintahan umum. Demikian halnya, alokasi belanja untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender juga masih rendah. Beberapa upaya untuk memperbaiki komposisi dan kualitas belanja pemerintah daerah adalah: (i) melakukan moratorium (tidak melakukan penambahan pegawai baru) dalam 2 - 3 tahun kedepan; (ii) sekiranya harus merekrut pegawai baru, harus diprioritaskan pada pegawai teknis seperti tenaga akuntan, tenaga guru, tenaga kesehatan dengan jumlah yang lebih kecil dari jumlah pegawai yang pension; (iii) meningkatkan proporsi alokasi belanja untuk sektor kesehatan dan pertanian serta sektor-sektor terkait dengan fungsi ekonomi, (iv) meningkatkan komitmen penentu kebijakan dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender; dan (v) merumuskan program dan kegiatan strategis yang responsif gender yang disertai dengan peningkatan alokasi anggaran.

Meningkatkan kualitas layanan dasar untuk memperbaiki kualitas capaian

Memperbaiki indikator-indikator komposit IPM, terutama indikator pendidikan. Rendahnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah berkontribusi besar terhadap rendahnya capaian IPM Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian yang lebih dengan mengalokasikan anggaran yang lebih signifikan untuk pemberantasan buta huruf serta mengupayakan peningkatan

akses penduduk terhadap pendidikan menengah dan tinggi. Upaya pemberantasan buta huruf perlu difokuskan pada perempuan dengan lokus wilayah bagian selatan Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Takalar dan Gowa. Sedangkan upaya peningkatan rata lama sekolah diarahkan pada kabupaten dengan kinerja jauh di bawah rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Wajo, dan Takalar.

Menajamkan alokasi anggaran kesehatan pada investasi kesehatan yang berdimensi jangka panjang. Kebijakan kesehatan selama ini yang lebih bertumpu pada pengobatan (tindakan kuratif) dengan dimensi jangka pendek perlu diimbangi dengan upaya pencegahan (tindakan preventif) dengan dimensi jangka panjang. Tindakan-tindakan dimaksud dapat berupa imunisasi, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan dan air bersih. Investasi kesehatan semacam ini potensial meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang dan memperbaiki indikator kesehatan IPM secara berkelanjutan.

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar. Meskipun secara relatif, infrastruktur dasar (sanitasi, air bersih, dan listrik) di Sulawesi Selatan menempati urutan terbaik kedua di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Utara, namun jika dibandingkan dengan angka nasional, capaian indikator tersebut masih relatif lebih rendah. Pembangunan sanitasi dan peningkatan akses air bersih perlu mendapat perhatian, terutama di kabupaten dengan tingkat capaian yang rendah. Sedangkan untuk peningkatan akses listrik, meskipun kewenangan penyediaan listrik masih melekat di pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu terus mendorong upaya peningkatan kapasitas energi listrik di Sulawesi Selatan.

Pembangunan sektor pertanian harus tetap menempatkan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan sebagai prioritas utama. Komoditas beras dan jagung harus diarahkan pada perbaikan kualitas melalui pengembangan produk organik. Pengembangan produk pertanian organik dapat dilakukan melalui intergrasi dengan pengembangan ternak. Integrasi padi dan jagung dengan ternak sapi akan menghasilkan pupuk organik, pakan ternak dari sisa tanaman, dan sumber energi (biogas) sehingga biaya produksi ketiga komoditas tersebut dapat ditekan dan kualitas dan tingkat harga produk yang lebih baik. Untuk komoditas udang, pengembangan udang organik dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan permintaan internasional dan sekaligus memulihkan atau memperbaiki ekosistem pertambakan agar kegiatan budidaya udang dapat lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengembangan komoditas kakao dan rumput laut seyogyanya diarahkan untuk menghasilkan produk olahan yang siap dikonsumsi.

Memperbaiki indikator pembentuk IPG dan IDG. Dengan mencermati indikator capaian IPG, penyumbang terbesar rendahnya IPG terutama disebabkan oleh rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dan laki-laki dan rendahnya angka melek huruf laki-laki dan perempuan. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan terutama terjadi di wilayah pesisir. Upaya untuk lebih meningkatkan peran perempuan baik terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga maupun berkiprah di ruang publik, perlu dilakukan beberapa hal seperti: (i) melakukan pendampingan pengelolaan usaha kaum perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan sumbangan pendapatan mereka dalam rangka meningkatkan IDG dan IPG; (ii) membina pendidikan keaksaraan fungsional; (iii) Melakukan sosialisai secara intensif dan penyadaran kepada masyarakat tentang Program Pendidikan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun yang responsif gender; dan (iv) melakukan pembinaan dan pendampingan kepada perempuan pesisir dalam hal teknis dan manajemen usaha.

KEMISKINAN DAN GENDER

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SULAWESI SELATAN TURUN DARI

14,6% MENJADI **11,6%**

TERKECIL KEDUA DI SULAWESI SETELAH SULAWESI UTARA (9%)

87% PENDUDUK MISKIN SULAWESI SELATAN ADA DI PEDESAAN

KABUPATEN DENGAN PERSENTASE **PENDUDUK MISKIN TERTINGGI** DI SULAWESI SELATAN

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) MEMBAIK DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN

HAL ITU MENYEBABKAN NAIKNYA ANGKA IPG DARI

2005 **57** MENJADI 2009 **62**

ANGKA IDG NAIK DARI

2005 **50** MENJADI 2009 **54**

SUMBER : **KAJIAN PENGELUARAN PUBLIK SULAWESI SELATAN 2012**

OVERVIEW

SELAMA 6 TAHUN TERAKHIR (2005-2010), PERTUMBUHAN EKONOMI SULSEL RATA-RATA LEBIH TINGGI DARI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL (6,8%)

ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA TURUN DARI

18,6% MENJADI **8,3%**

ANGKA PENGANGGURAN NASIONAL

7,14% 2010

ANGKA IPM MENINGKAT DARI

2006 **68,8** MENJADI 2010 **72,2**

ANGKA NASIONAL

73,4

SUMBER : **KAJIAN PENGELUARAN PUBLIK SULAWESI SELATAN 2012**

SEKTOR INFRASTRUKTUR

BELANJA INFRASTRUKTUR MENINGKAT LEBIH DARI **2** kali lipat

60% belanja infrastruktur PROVINSI dialokasikan untuk belanja modal

82% belanja infrastruktur KAB/KOTA dialokasikan untuk belanja modal

WALAUPUN MASIH DI BAWAH ANGKA NASIONAL, CAKUPAN INFRASTRUKTUR DASAR DI SULAWESI SELATAN

RELATIF LEBIH BAIK

DIBANDING PROVINSI LAIN DI SULAWESI.

DALAM KURUN 2006-2010, AKSES RUMAH TANGGA YANG DIKEPALAI PEREMPUAN TERHADAP AIR BERSIH, **MENURUN**. TETAPI AKSES RUMAH TANGGA TERSEBUT TERHADAP SANITASI **MENGALAMI PENINGKATAN**.

PANJANG JALAN TERUS BERTAMBAH, TETAPI KUALITASNYA TIDAK BERUBAH.

PROPORSI JALAN BERKATEGORI RUSAK MENINGKAT DARI

2005 **13%** menjadi 2010 **49%**

ARUS PENGGUNA TRANSPORTASI UDARA DI SULAWESI SELATAN MENINGKAT HAMPIR **2 KALI LIPAT**

SUMBER : KAJIAN PENGELUARAN PUBLIK SULAWESI SELATAN 2012

SEKTOR PENDIDIKAN

BELANJA PENDIDIKAN MENINGKAT PESAT, DARI Rp **1,7** triliun menjadi Rp **5,1** triliun

SEKTOR PENDIDIKAN KINI MERUPAKAN SEKTOR YANG MENYERAP BELANJA TERBESAR DI SULAWESI SELATAN

BELANJA PENDIDIKAN PEMERINTAH PROVINSI DIGUNAKAN UNTUK BELANJA PEGAWAI **64%**

BELANJA PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DIGUNAKAN UNTUK BELANJA PEGAWAI **81%**

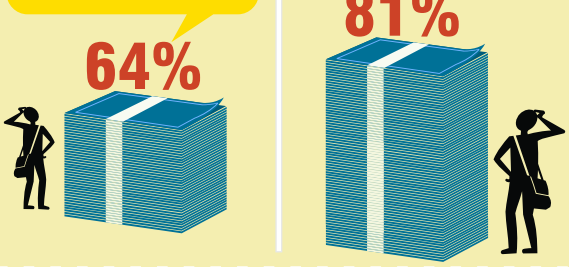

ANGKA MELEK HURUF SULAWESI SELATAN **87,75**

MASIH TERTINGGAL DARI ANGKA NASIONAL **92,91**

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PEREMPUAN LEBIH TINGGI DARI LAKI-LAKI, TETAPI MASIH LEBIH BANYAK PEREMPUAN YANG BUTA HURUF DIBANDING LAKI-LAKI.

SUMBER : KAJIAN PENGELUARAN PUBLIK SULAWESI SELATAN 2012

SEKTOR KESEHATAN

BELANJA KESEHATAN MENINGKAT MENJADI

Rp. **1,7** TRILIUN — 2010

dari

Rp. **658** MILIAR — 2005

ATAU SEKITAR **10%** DARI TOTAL BELANJA DAERAH

CAPAIAN INDIKATOR KESEHATAN DASAR SULAWESI SELATAN RELATIF BAIK DI SULAWESI

ANGKA KEMATIAN BAYI TERUS MENURUN

dari **28,9** (2005)

menjadi **26,2** (2009)

RASIO FASILITAS KESEHATAN MENINGKAT

2005: **2,2**

MENJADI

2009: **2,7**

RASIO TENAGA KESEHATAN MENINGKAT

2005: **15,0**

MENJADI

2009: **70,8**

ANGKA HARAPAN HIDUP MENINGKAT LEBIH CEPAT DARI RATA-RATA NASIONAL

2007: **70,2** (NASIONAL 70,4)

MENJADI

2010: **70,8** (NASIONAL 70,9)

TETAPI PREVALENSI GIZI BURUK JUSTRU MENINGKAT DARI

2007: **5,1%** MENJADI 2010: **6,4%**

SUMBER : KAJIAN PENGELUARAN PUBLIK SULAWESI SELATAN 2012

SEKTOR PERTANIAN DAN KOMODITAS UNGGULAN

DAERAH YANG MENJADI SENTRA KOMODITAS UNGGULAN MEMILIKI BELANJA PERTANIAN YANG LEBIH BESAR DIBANDING DAERAH LAIN, MISALNYA

SIDRAP	PINRANG	JENEPONTO
Rp. **13** MILYAR	Rp. **22** MILYAR	Rp. **23** MILYAR

TARGET PRODUKSI

BERAS, JAGUNG, DAN SAPI DIPERKIRAKAN AKAN TERCAPAI PADA TAHUN **2013**

PRODUKSI RUMPUT LAUT BAHKAN TELAH MELAMPAUI TARGET

SUMBER : KAJIAN PENGELUARAN PUBLIK SULAWESI SELATAN 2012

PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH

PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH MENINGKAT DARI **RP. 9 TRILIUN** MENJADI **RP. 16 TRILIUN**

TUMBUH RATA RATA SEBESAR **13%** PER TAHUN

TETAPI MAYORITAS (RATA-RATA 76%) MASIH BERSUMBER DARI TRANSFER PEMERINTAH PUSAT (DAU DAN DAK)

PAD RATA-RATA MENYUMBANG HANYA 15% PENDAPATAN DAERAH

PARE-PARE, SELAYAR, & PALOPO
ADALAH DAERAH YANG MEMILIKI PENDAPATAN DAERAH PER KAPITA TERTINGGI DI SULAWESI SELATAN
GOWA, MAKASSAR, DAN BONE
ADALAH YANG TERENDAH

BELANJA PEMERINTAH DAERAH JUGA MENINGKAT LEBIH DARI 2 KALI LIPAT,
DARI **8,7** TRILIUN MENJADI **18,3** TRILIUN

MAYORITAS BELANJA MASIH DIDOMINASI BELANJA PEGAWAI
HAMPIR SEPARUH BELANJA ADALAH UNTUK PEGAWAI
49%

DI TINGKAT PROVINSI, MAYORITAS BELANJA ADALAH TRANSFER KE DAERAH BAWAHAN **40%**

TRANSFER INI MAYORITAS ADALAH KONTRIBUSI PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS.
SEMENTARA DI TINGKAT KABUPATEN, SEPARUH BELANJA MASIH UNTUK PEGAWAI.

PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH

34%

DI TAHUN 2005, **SEKTOR PEMERINTAHAN UMUM** (DI LUAR TRANSFER) ADALAH SEKTOR YANG MENYERAP BELANJA PALING BESAR

ENAM TAHUN KEMUDIAN (2010) **SEKTOR PENDIDIKAN** MENYERAP BELANJA TERBESAR

31%

BELANJA PER KAPITA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PARE-PARE
ADALAH DAERAH ADALAH YANG TERTINGGI

MAKASSAR
ADALAH YANG TERENDAH

SUMBER : **KAJIAN PENGELUARAN PUBLIK SULAWESI SELATAN 2012**